



Tahun Depan Camat Berganti Nama



**Beny
Suharsono**
Paniradya Pati DIY

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY menargetkan perubahan nomenklatur desa dan kecamatan di seluruh DIY bisa dimulai pada tahun 2020 mendatang. Pilot nomenklatur ini akan dimulai dari Kabupaten Kulon Progo.

"Piloting pertama adalah Kulon Progo kemudian Gunungkidul, Bantul, dan Kota (Yogyakarta). Untuk Sleman masih menunggu persetujuan dengan DPRD baru," ujar Paniradya Pati DIY, Beny Suharsono, akhir pekan kemarin.

Nantinya, sebanyak 78 kecamatan di kota dan kabupaten akan berganti nama. Untuk 14 kecamatan di kota akan menjadi Kemantren yang dipimpin oleh Mantri.

Sementara, untuk 64 kecamatan di kabupaten akan berganti menjadi Kapanewon yang dipimpin oleh seorang penewu. Bahkan, salah satu kecamatan di Sleman pun sudah menggunakan nomenklatur ini. "Banyak yang bangga camatnya disebut dengan Penewu," ujar Beny.

Untuk desa, Beny menyebut akan berganti menjadi Kalurahan. Sehingga

● ke halaman 15

Negatif Amat Segera

Tahun Depan Camat Berganti

● Sambungan Hal 9

ga kepala desa nantinya akan berganti menjadi lurah sebutannya. Untuk 45 kelurahan di kota pun tetap menggunakan administratif ini. "Nanti juga akan muncul Carik, Jogoboyo, dan sebagainya," katanya.

Perubahan nama ini, kata Beny, yang paling penting adalah menyiapkan tiga hal. Di antaranya adalah kewenangan harus muncul, kemudian SOTK, dan juga peraturan desa yang harus muncul.

Meski mempengaruhi semua hal yang berbau administrasi penduduk, tapi penyesuaian nama ini bukan hal yang rumit. "Memang

perlu penyesuaian, tapi-tidak merubah kodifikasi desa jadi enggak masalah. Bukan persoalan yang rumit kok," ujarnya.

Beny menyebutkan, anggaran kelembagaan dari dana keistimewaan mencapai 1,07 persen di tahun 2020. Dia pun meminta semua masyarakat menyambut gembira dengan nomenklatur ini. "Ini merupakan perintah UU dan kita memiliki UU Keistimewaan yang berbeda dengan wilayah lain," katanya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mendukung langkah Pemda DIY untuk mengubah nomenklatur kecamatan dan desa ini. Perubahan ini diharapkan membawa semangat kesejahteraan bagi masyarakat hingga tingkat desa.

"Ini kan semangatnya

membawa manfaat keistimewaan hingga tingkat bawah. Selama ini untuk kesejahteraan kamo mendukung," urai Huda kepada *Tribun Jogja*, Minggu (24/11) malam.

Huda menambahkan, kajian teknis dan sejumlah persoalan administrasi nantinya bisa diselesaikan dengan baik. Pihaknya pun mendukung seluruh langkah untuk keistimewaan DIY.

Disinggung perlunya sosialisasi pada masyarakat, Huda mengaku percaya dengan pemerintah yang sudah menyiapkan langkah antisipatif. Apalagi, sistem pemerintahan di Pemda DIY sudah *settle*. "Nanti bisa dilaksanakan bertahap dan tidak sulit. Apalagi ini menyangkut keistimewaan," katanya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005